

**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI II DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 22 Januari 2014
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: 1. Perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 2. Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam susunan "Kabinet Kerja" 2014-2019
Ketua Rapat	: <b>Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/KabagSet Komisi II DPR RI
Hadir	: 34 dari 50 Anggota Komisi II DPR RI

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 dibuka pada pukul 14.40 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Bapak **Rambe Kamarul Zaman** dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda acara pada hari ini yakni terkait dengan Rencana Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk masa kerja 2014-2019.
3. Ketua Rapat memperkenalkan Pimpinan dan Anggota Komisi II kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan mempersilahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk memberikan pemaparannya.
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN memberikan pemaparan terkait:
  - a. Visi dan Misi Pemerintah dalam rangka "Sembilan Agenda Prioritas Presiden Republik Indonesia" periode 2014-2019 serta 7 (tujuh) tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  - b. Program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki *Quick wins* dengan sasaran:
    - 1) Pembentukan model Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
    - 2) Perpres Bank Tanah;
    - 3) Penyusunan INPRES Tanah Terlantar;
    - 4) Penyusunan Perpers Reforma Agraria;
    - 5) Penetapan Revisi Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur dan Kawasan lainnya;
    - 6) Penyusunan Pedoman Perlindungan PPNS.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI dapat menerima penjelasan tentang Rencana Strategis, program kerja dan skala prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan meminta kepada Kementerian agar melaksanakan program tersebut secara konsisten khususnya 9 agenda prioritas dan 7 (tujuh) langkah tugas dan fungsi utama demi kesejahteraan rakyat.
2. Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan kasus tanah yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, karena kasus-kasus tanah sudah menjadi persoalan besar Bangsa dan Negara. Komisi II DPR RI meminta agar Kemterian Agraria dan Tata Ruang dapat menentukan sistem dan mekanisme khusus yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
3. Komisi II DPR RI mendukung penyelesaian konflik pertanahan dengan mengedepankan jalur mediasi daripada jalur peradilan, namun demikian harus ada kejelasan dan kepastian penyelesaian masalah pertanahan yang ditempuh melalui mediasi yang tuntas dan mencari alternatif peradilan yang dapat memberikan keputusan final dan mengikat.
4. Komisi II DPR RI meminta Kementeiian Agraria dan Tata Ruang agar memperhatikan secara sungguh-sungguh peningkatan sumberdaya manusia di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, khususnya pada aparat yang memberikan pelayanan dan kebijakan seperti juru ukur, baik dari segi kualitas maupun kuantitas juru ukurnya sehingga proses pengukuran tanah dalam rangka legalisasi aset semakin mudah dan cepat.
5. Komisi II DPR RI bertekad mendorong terbentuknya UU tentang Pertanahan sebagaimana amanat TAP MPR RI Nomor IX tahun 2001 yang kemudian ditegaskan kembali dalam TAP MPR-RI No.1 Tahun 2003 untuk nantinya dibahas bersama dengan pemerintah dan diharapkan dapat selesai tahun 2015.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.07 WIB.

**JAKARTA, 22 JANUARI 2015**  
**KETUA KOMISI II DPR RI**

ttd

**RAMBE KAMARUL ZAMAN**  
**A-236**